

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SONGAN B KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

Ade Ayu Anggreni Putri¹

I Wayan Sudiana²

I Putu Deddy Samtika Putra³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
e-mail: adeayuanggreni@yahoo.com

ABSTRACT

Village funds are the source of income for each village, need to be controlled over their management, it should right on target and can improve people's lives. This study aims to determine the effects of Accountability, Transparency, Community Participation on Community Empowerment in Village Fund Management in Songan B Village, Kintamani District, Bangli Regency. The population in this study were the people of Songan B Village, Kintamani District, Bangli Regency who had voting rights and / or were 17 years old, while 100 people were the object of research (sample). The sampling technique used was purposive sampling technique. The results showed that the variables of transparency and community participation had a positive and significant effect on community empowerment, while the accountability variable had no effect on community empowerment.

Keywords: *Village Fund, Accountability, Transparency, Community Participation, Community Empowerment*

ABSTRAK

Dana desa yang merupakan sumber pemasukan setiap desa perlu dikontrol atas pengelolaannya, agar tepat sasaran dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang telah memiliki hak suara dan/atau telah berusia 17 tahun, sedangkan yang dijadikan objek penelitian (sampel) yaitu sebanyak 100 orang. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada pemberdayaan masyarakat, sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : *Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang memiliki tujuan guna mengoptimalkan program pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia khususnya di pedesaan yang merupakan fokus dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo, beliau memiliki sembilan agenda prioritas yaitu membangun Indonesia dari daerah pinggiran, dalam hal ini adalah Desa. Keberhasilan pembangunan di tiap-tiap desa sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi perangkat desa dan masyarakat setempat. Perangkat desa merupakan abdi negara di tingkat desa harus memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mewujudkan pembangunan desa, adapun masyarakat harus memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam program-program yang dicanangkan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, antara perangkatdesa dengan masyarakat harus saling mendukung, dimana pemerintah daerah berperan sebagai penggagas dan penggerak partisipasi, adapun masyarakat sebagai pihak yang berkontribusi dalam berbagai program pembangunan desa.

Desa berperan penting dalam merealisasikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan kebijakan Perundang-undangan baru yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dimana Undang-undang ini sebagai dasar pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah desa atau desa untuk mengatur wilayahnya sendiri sebagai desa yang otonom.

Adanya Undang-undang No 6 Tahun 2014 memiliki tujuan untuk percepatan pembangunan pedesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah sejak tahun 2015 menggelontorkan anggaran dana desa kepada setiap desa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 disebutkan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Sejak awal dialokasikannya dana desa, anggaran untuk dana desa setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan secara signifikan. Dengan adanya peningkatan alokasi dana tiap tahunnya diharapkan dapat membawa dampak yang baik terhadap perekonomian desa.

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan sumber pemasukan terbesar bagi desa. Dengan adanya pemasukan dana ini, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Namun, adanya Dana Desa ini dapat memicu timbulnya masalah baru

dalam pengelolaannya, sehingga aparatur desa diharuskan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa tersebut yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam pengelolaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta memprioritaskan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Banyaknya masalah yang timbul akibat penerimaan dana desa pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 2 yang mengacu pada keuangan desa dalam pengelolaannya dilandaskan pada asas transparansi, akuntabel, partisipatif dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Mardiasmo (2009), mengungkapkan bahwa akuntabilitas ialah kewajiban pihak yang diberikan amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan dan melaporkan seluruh kegiatan dan program telah dilaksanakannya kepada pihak pemberi amanah tersebut. Hasil studi Weny Ultafiah (2017) menyatakan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan dengan memberikan informasi keuangan dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap perundang-undangan (PP Pasal 25 Nomor 71 Tahun 2010). Penelitian Rizky Amalia Sugista (2017) menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap pembangunan desa dalam pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor keberhasilan pembangunan maupun pengembangan masyarakat desa (Tumbel, 2017). Partisipasi Masyarakat merupakan peran aktif publik terhadap program yang didakan pemerintah, yang ditujukan guna mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam menciptakan anggaran yang efektif, maka perlu adanya peran aktif dari masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan dana desa (Utami dan Efrizal, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh I Made Yoga Darma Putra (2019) melaporkan bahwa partisipasi masyarakat mempengaruhi secara positif pada efektivitas pengelolaan dana desa.

Pemberdayaan masyarakat diharapkan akan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang akan menjadikan masyarakat memiliki kreatifitas dan aktif dalam menciptakan peluang pekerjaan atau perbaikan perekonomian desa sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya untuk membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral masyarakat lemah dan miskin dan memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan sanggup memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka (Sumaryadi, 2005).

Pemerintah Kabupaten Bangli terletak di Provinsi Bali telah melakukan perincian atas penerimaan dana desa yang mengacu pada Peraturan Bupati Bangli No 46 tahun 2019 mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa, jumlah dana desa yang diterima oleh setiap desa pengalokasiannya berdasarkan empat faktor meliputi: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan letak kesulitan geografis pada setiap desa yang ada di Kabupaten Bangli. Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Bangli yaitu 68 desa yang berada di 4 Kecamatan yakni Kecamatan Bangli, Tembuku, Susut dan Kintamani. Berikut data penerimaan dana desa di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli:

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa Per Kecamatan Kabupaten Bangli Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dana Desa
1	Kecamatan Bangli	5	Rp. 4.259.852.000
2	Kecamatan Susut	9	Rp. 8.184.850.000
3	Kecamatan Tembuku	6	Rp. 5.763.702.000
4	Kecamatan Kintamani	48	Rp. 45.283.823.000
Total Anggaran Dana Desa Di Kabupaten Bangli			Rp. 63.492.227.000

Sumber : Perbub No 46 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Dari Rincian Penetapan Anggaran Dana Desa Tahun 2020 Kecamatan Kintamani memperoleh dana desa terbanyak karena jumlah desa yang dimiliki Kecamatan Kintamani lebih banyak dibandingkan Kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Bangli. Di Kecamatan Kintamani desa yang memperoleh Dana Desa terbanyak Tahun anggaran 2020 adalah Desa Songan B, dimana desa Songan B pada tahun 2020 mendapat anggaran dana desa sebanyak Rp. 2.117.846.000. Desa Songan B terletak di kawasan lereng gunung Batur dan Danau Batur. Masyarakat Desa Songan B sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, peternak ikan, penambang pasir, pemandu wisata dan lainnya. Dari data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bangli penyerapan anggaran dana desa pada desa Songan B tahun 2019 sudah mencapai 94% atau bisa dikategorikan penyerapan anggaran dana desanya tergolong baik. Akan tetapi dengan perolehan dana desa terbanyak dan serapan anggaran dana desa yang cukup tinggi di desa Songan B masih memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak diantara desa lain yang ada di Kabupaten Bangli, yaitu sebesar 789 jiwa dari total jumlah penduduk 11.836 jiwa yang menetap di desa Songan B.

Dengan penerimaan dana desa yang besar aparat desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan baik agar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan potensi-potensi yang cukup beragam yang dimiliki oleh Desa Songan B. Potensi yang dimiliki desa ini diantaranya adalah di bidang pertanian dengan lahan yang dimiliki yang cukup subur, potensi perternakan ikan, potensi pariwisata dengan memanfaatkan pemandangan alam yang indah dan pertambangan pasir. Dengan banyaknya potensi yang ada, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa songan B. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Songan B dengan mengambil penelitian berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli”**.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaruh akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli?
- 2) Bagaimanakah pengaruh transparansi terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli?
- 3) Bagaimanakah pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan dana desa untuk penggunaan anggaran tersebut yang dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat dan menjadi bahan informasi guna mengoptimalkan keahlian masyarakat, terutama bagi perangkat desa sebagai pengelola dana desa. Dan penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti topik yang sejenis, sebagai referensi studi berikutnya terutama bagi mahasiswa yang meneliti mengenai dana desa, dan dapat digunakan untuk pembandingan hasil penelitian mapun ilmu pengetahuan.

KAJIAN PUSTAKA

Grand theory yang melandasi penelitian ini adalah Teori Keagenan. Teori keagenan kontrak antara pihak manajemen perusahaan (*Agents*) dengan pemilik perusahaan (*principal*). Hubungan kontraktual dapat terjadi apabila pihak pemilik memberikan tugas kepada pihak manajemen untuk melaksanakan proses manajemen perusahaan (Achmad, 2012:269). Berkaitan dengan lembaga sektor publik, dalam hal ini *principals* merupakan masyarakat dan *agents* merupakan pemerintah desa (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016). Implikasi dari teori keagenan dengan penelitian ini yaitu guna mengetahui eksistensi perangkat desa sebagai lembaga pengabdian masyarakat yang dipercaya masyarakat untuk menerima dan mendengarkan aspirasi rakyat, melayani masyarakat sebaik mungkin, dan mampu mempertanggung jawabkan segala hal yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, seluruh tujuan pemerintahdesa dalam mensejahterakan masyarakat dapat terwujud secara optimal. Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari baik tidaknya akuntabilitas dan transparansi kinerjanya.

Akuntabilitas adalah permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan kinerja pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas juga memiliki arti kemampuan menunjukkan catatan dan laporan yang bisa dipertanggungjawabkan (Suharto: 2006).

Transparansi menurut Mardiasmo (2016) ialah keterbukaan aparat pemerintahan untuk menyampaikan informasi kepada publik mengenai pengelolaan sumber daya publik. Transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan desa merupakan hal yang penting sebab sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada publik, selain itu sebagai usaha pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Transparansi adalah terbentuknya akses bagi publik dalam mendapatkan informasi tentang proses perencanaan, penyelenggaraan, pertanggung jawaban pengelolaan dana desa.

Histiraludin (dalam Handayani 2006) menyatakan bahwa partisipasi ialah keterlibatan publik secara aktif dalam berbagai program, sebagai sarana untuk menumbuhkan kohesifitas dimasyarakat, dan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab baik pemerintah maupun masyarakat pada setiap program yang diadakan pemerintah. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Permendagri RI Nomor 7 tahun 2007 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk

mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses sebagai upaya memberikan kesempatan dan kemampuan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan.

Hasil penelitian sebelumnya yang diambil dan dijadikan pedoman dalam penelitian ini yaitu penelitian dari Erni Tahir (2018) menunjukkan bahwa alokasi dana desa mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Jaya Makmur. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratih Ranika Putri Utami (2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan transparansi pengelolaan keuangan dana desa tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amalia Sugista (2017) menunjukkan hasil bahwa Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa secara signifikan berpengaruh positif terhadap Pembangunan Desa di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Nurfitriani (2019) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa pada 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Umaira (2019) dimana penelitian ini memberikan hasil bahwa Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan pokok permasalahan dan landasan teori tersebut maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah bentuk pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh aparatur desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana untuk digunakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas harus didasarkan pada tujuan dari penggunaan dana desa tersebut, yakni guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana salah satu upayanya dengan cara memberdayakan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Indrawati Syafi'I, dkk (2018) meneliti tentang pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli .

Transparansi merupakan keterbukaan tentang segala informasi kepada masyarakat, serta jika masyarakat memerlukan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah maka masyarakat

dengan mudah dapat memperoleh informasi tersebut. Terciptanya tansparansi dalam pengelolaan dana desa ini dapat memudahkan pihak yang berwenang untuk mengawasi proses pengelolaan dana tersebut, sehingga dana desa yang digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dapat terwujud secara efektif dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Erni Tahir (2018) yang menunjukkan bahwa transparansi mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Sehingga hipotesis yang dirumuskan pada studi ini yaitu:

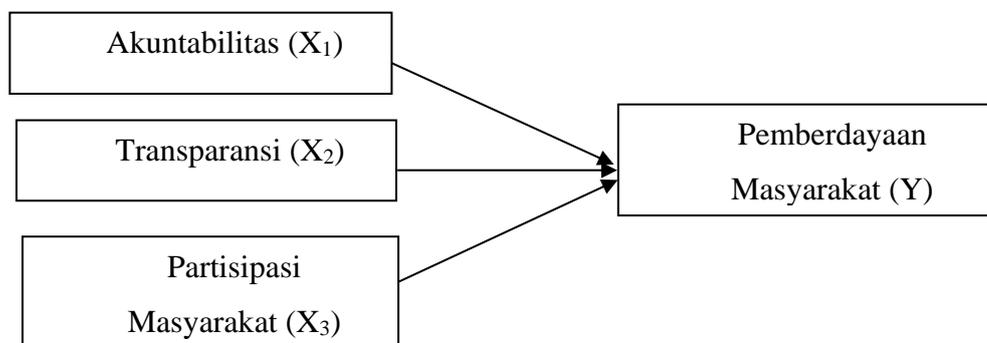
H₂ : Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli .

Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemberdayaan sumber daya manusia desa terhadap pengelolaan dana desa terjadi sebab adanya tuntutan bahwa masyarakat harus ikut serta dalam setiap prosesnya. Partisipasi masyarakat ini baik dalam proses perencanaan maupun menyampaikan pendapat kepada pemerintah. Penelitian Rizky Amalia Sugista (2017) melaporkan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat mempengaruhi secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sebab akibat variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2017:20). Oleh Karena itu, secara skematis model penelitian ini dapat digambarkan seperti gambar 3.1



Gambar 3.1 Kerangka Berfikir.

Definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah: akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberi pertanggung jawaban kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan organisasi kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah diciptakan. Diadaptasi dari penelitian Rizky Amalia Sugista (2017) menjelaskan bahwa indikator pengukuran variabel akuntabilitas yaitu: tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa, adanya ikut serta perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, adanya monitoring pelaksanaan serta adanya penyusunan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Transparansi adalah proses keterbukaan kepada publik guna mendapatkan informasi yang akurat dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan program organisasi yang mengutamakan perlindungan atas hak asasi individu, kelompok, dan rahasia Negara. Oleh karena itu aparatur desa dan pengelola wajib menyampaikan penggunaan dana desa secara terbuka mengingat dana desa tersebut adalah milik rakyat dan merupakan dana masyarakat yang penggunaannya harus diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut Kristianten (2006) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu: keterbukaan proses, kejelasan dan kelengkapan informasi, kesediaan dan aksesibilitas dokumen dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Diadaptasi dari penelitian Rizky Amalia Sugista (2017) menyebutkan bahwa indikator pengukuran variabel transparansi yaitu: pemberian akses informasi yang akurat mengenai proses perencanaan, tahapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dilaksanakannya musyawarah dengan masyarakat, keterbukaan dalam seluruh proses pengelolaan dan informasi mengenai proses serta hasil pengelolaan keuangan desa.

Menurut Wazir (1999) partisipasi adalah seseorang dengan sadarnya terlibat dan berinteraksi sosial dalam situasi tertentu. Partisipasi masyarakat adalah masyarakat turut andil dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada pada masyarakat dan mengambil solusi yang paling alternatif dalam menangani suatu masalah serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi. Diadaptasi dari penelitian Rizky Amalia Sugista (2017) menyebutkan bahwa indikator pengukuran meliputi: keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penilaian hasil dan keterlibatan masyarakat dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk membangun dan mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan masyarakat. Dari hasil studi Rika Ardiyanti (2019) disebutkan bahwa indikator pengukuran yaitu: kemampuan, kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab. Pengukuran

variabel penelitian menggunakan skala likert 5 point dalam kisaran “sangat tidak setuju” diberi skala 1 dan “sangat setuju” diberi skala 5.

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi pada studi ini yaitu semua masyarakat Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang sudah mempunyai hak suara (usia 17 tahun). Penetapan populasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa individu yang berusia 17 tahun dinilai sudah dewasa dan cakap terhadap hukum. Penduduk Desa Songan B yang berusia diatas 17 tahun sebanyak 7.125 jiwa. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017 :137). Sedangkan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode slovin. Penelitian ini menetapkan batas toleransi kesalahan pengambilan sampel sebesar 10% yang berarti tingkat akurasi pengambilan sampel sebesar 90%. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini jika dihitung dengan rumus slovin menjadi:

$$n = \frac{7.125}{1+7.125 (0,1)^2}$$
$$n = 98.61$$
$$n = 99 \text{ (dibulatkan)}$$

Berlandaskan perhitungan tersebut, maka didapatkan sampel sejumlah 99 orang, dan pada pelaksanaannya menggunakan 100 orang. Responden sebagai sampel harus menjawab kuesioner dengan lengkap, apabila sampel tidak menjawab dengan lengkap maka kuesioner tidak dapat diolah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *Simple random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Sugiyono 2001:57).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Uji instrumen penelitian

Uji validitas bertujuan untuk menguji sejauh mana item pertanyaan/ Pernyataan yang valid dan mana yang tidak. Mengukur validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan koreksi *bivariate* antar masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk melalui program SPSS. Apabila analisis faktor telah dilakukan dengan cara mengkorelasikan jumlah skor faktor dengan skor total dan mendapatkan korelasi tiap faktor tersebut positif dan lebih besar dari 0,3 maka faktor tersebut merupakan konstruk yang kuat dan instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik (Sugiyono, 2017:215).

Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Guna melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, penulis menggunakan koefisien *Cronbach alpha* (α) dengan menggunakan SPSS. Bila hasil *Cronbach alpha* bernilai lebih besar dari 0,70 maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel (Sugiyono, 2017:199).

2) Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak (Suyana, 2016:99). Untuk mendeteksi suatu normalitas data digunakan statistik *Kolmogorov-Smirnov* dengan melihat signifikansi yang didapat dengan tingkat alpha yang digunakan 5%, apabila $\text{sig} \geq \alpha$ maka dikatakan data berdistribusi normal (Ghozali, 2007).

Uji multikolinearitas adalah pengujian yang ditujukan guna menguji dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasnya atau tidak. Model regresi dikatakan baik jika tidak ada korelasi antar variabel independennya. Pengujian ini dapat melihat nilai toleransinya dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Model regresi terbebas dari multikolinearitas, apabila memiliki nilai toleransi $\geq 0,1$ atau $\text{VIF} \leq 0,1$ (Ghozali, 2007).

Uji heteroskedastisitas pada studi ini menggunakan uji glejser. Uji Glejser menggunakan koefisien signifikansinya yaitu 5%, apabila nilai signifikansinya $> 5\%$ maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3) Analisis Regresi Linier Berganda

Studi ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Analisis ini berfungsi untuk menilai arah dan besarnya pengaruh dari variabel independennya. Persamaan regresi linier berganda dirumuskan sebagaimana berikut ini (Sugiyono, 2012):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- | | |
|---|---|
| Y = Pemberdayaan Masyarakat | X ₁ = Akuntabilitas |
| α = Konstanta | X ₂ = Transparansi |
| $\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi variabel X ₁ , X ₂ , dan X ₃ | X ₃ = Partisipasi Masyarakat |
| | e = Standar error |

Hasil dari analisis yang dilakukan dapat diamati sebagai berikut :

- a) Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variansi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variansi variabel dependen (Ghozali, 2016:92).

- b) Uji F berfungsi guna mengetahui model regresi layak digunakan atau tidak pada studi ini dan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika nilai signifikansi $\alpha < 0,05$ maka model regresi dikatakan layak, dan secara sekesluruhan variabel bebas mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya (Ghozali, 2016:99).
- c) Uji t berfungsi guna mengetahui seberapa jauh satu variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikatnya. Dasar pengambilan keputusan hipotesis yaitu: Jika nilai $p\text{-value} > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikatnya, dan sebaliknya jika nilai $p\text{-value} < 0,05$ maka hipotesis diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden merupakan keadaan atau identitas yang melekat pada responden. Dalam penelitian ini karakteristik responden didasarkan pada jenis kelamin, usia dan pekerjaan. Berdasarkan tabel pada lampiran 2 dapat dilihat bahwa dari 100 responden pada studi ini didominasi oleh laki-laki sejumlah 67 orang, dan perempuan sejumlah 33 orang. Berlandaskan usia responden ditunjukkan bahwa kelompok usia 17-30 tahun sejumlah 35 orang, usia 31-45 tahun sejumlah 39 responden, usia 46-60 tahun sejumlah 24 responden, dan kelompok usia lebih dari 60 tahun sejumlah 2 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi dengan kelompok usia 31-45 tahun dengan jumlah responden sejumlah 39 orang. Berdasarkan pekerjaan dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh petani sejumlah 58 orang, wiraswasta sejumlah 23 orang, sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah 7 orang, dan sebagai pegawai swasta sejumlah 6 orang, serta 6 responden lainnya berprofesi sebagai mahasiswa.

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	10.00	15.00	12.6900	1.03177
X2	100	14.00	20.00	16.9700	1.35180

X3	100	18.00	29.00	24.7000	1.96176
Y	100	25.00	37.00	32.7800	2.49679
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari setiap variabel Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat. Standar Deviasi digunakan untuk mengukur sebaran data yang dilakukan dalam penelitian yang mencerminkan data tersebut homogen atau heterogen yang memiliki sifat fluktuatif. Semakin tinggi nilai standar deviasi maka data tersebut bersifat heterogen.

2. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

a) Hasil Uji Validitas

Tabel 4.2

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Butir	<i>Pearson Correlation</i>	r-batas	Keputusan
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0,717	0,30	Valid
	X1.2	0,737	0,30	Valid
	X1.3	0,818	0,30	Valid
Transparansi (X2)	X2.1	0,560	0,30	Valid
	X2.2	0,740	0,30	Valid
	X2.3	0,684	0,30	Valid
	X2.4	0,726	0,30	Valid
Partisipasi Masyarakat (X3)	X3.1	0,579	0,30	Valid
	X3.2	0,571	0,30	Valid
	X3.3	0,708	0,30	Valid
	X3.4	0,586	0,30	Valid
	X3.5	0,584	0,30	Valid
	X3.6	0,657	0,30	Valid
Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Y.1	0,645	0,30	Valid
	Y.2	0,632	0,30	Valid
	Y.3	0,491	0,30	Valid
	Y.4	0,534	0,30	Valid
	Y.5	0,630	0,30	Valid
	Y.6	0,567	0,30	Valid

Y ₇	0,624	0,30	Valid
Y ₈	0,661	0,30	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2020.

Hasil Uji validitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian yang dipergunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat memiliki nilai *pearson correlation* di atas 0,3, hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap butir pernyataan dalam instrumen penelitian tersebut dinyatakan valid dan layak dipergunakan untuk instrumen penelitian.

b) Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.3

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Reliabilitas	Keputusan
1	Akuntabilitas (X1)	0.630	0,60	Reliabel
2	Transparansi (X2)	0.613	0,60	Reliabel
3	Partisipasi Masyarakat (X3)	0.665	0,60	Reliabel
4	Pemberdayaan Masyarakat (Y)	0.737	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2020.

Dari tabel hasil uji reabilitas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih diatas 0.60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini telah *reliable*.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji residual yang sudah memiliki standarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Data terdistribusi normal memiliki arti data menyebar normal dan diambil dari populasi normal. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *unstandardized residual* sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05, hal tersebut mengindikasikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdistribusi normal , sehingga dilakukan outlier data sebelum dimasukkan kedalam model regresi. Outlier dilakukan dengan mengeluarkan 1 buah data yang dianggap memiliki sebaran yang jauh dari data yang lain. Setelah dilakukannya outlier didapatkanlah hasil nilai *unstandardized residual* sebesar 0,070 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola distribusi residual terdistribusi secara normal, sehingga model regresi memenuhi uji normalitas.

b) Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Toleran	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	6.899	2.181		3.163	.002			
1 X1	.059	.158	.026	.372	.710	.782	1.279	
X2	.531	.168	.302	3.154	.002	.400	2.502	
X3	.655	.112	.542	5.852	.000	.428	2.337	

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan nilai *tolerance* dari ketiga variabel > 0,10 dan nilai VIF dari ketiga variabel < 10, maka dapat dikatakan tidak ada multikolinieritas antar variabel independen.

c) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	2.370	1.306		1.815	.073	
1 X1	.108	.094	.129	1.147	.254	
X2	.026	.101	.040	.255	.800	
X3	-.125	.067	-.283	-1.860	.066	

a. Dependent Variable: Abs_Ut

Sumber : Data primer diolah, 2020.

Pengujian Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Glejser. Hasil uji statistik ditunjukkan nilai signifikansi dari seluruh variabel independen adalah > 0,05 atau sebesar X1=0.254; X2=0.800; X3=0.066. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model regresi pada studi ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.	
	B	Std. Error	Coefficients Beta			
	(Constant)	6.899	2.181		3.163	.002
1	X1	.059	.158	.026	.372	.710
	X2	.531	.168	.302	3.154	.002
	X3	.655	.112	.542	5.852	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berlandaskan hasil analisis regresi linier berganda tersebut, maka dapat disusun model regresi linier berganda yaitu:

$$Y = 6,899 + 0,059X_1 + 0,531X_2 - 0,655X_3$$

- a. Nilai Konstantanya 6,899 artinya, apabila variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat mempunyai nilai konstan maka variabel pemberdayaan masyarakat memiliki nilai 6,899.
- b. Koefisien regresi variabel akuntabilitas bernilai 0,059 positif, hal tersebut megindikasikan jika ada peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sebesar 1% maka pemberdayaan masyarakat juga meningkat 0,059 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi adalah tetap.
- c. Koefisien regresi variabel transparansi bernilai 0,531 positif, hal tersebut megindikasikan jika ada peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa sebesar 1% maka pemberdayaan masyarakat juga meningkat 0,531 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi adalah tetap.
- d. Koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat bernilai 0,655 positif, hal tersebut megindikasikan jika ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sebesar 1% maka pemberdayaan masyarakat juga meningkat 0,655 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi adalah tetap.

5. Hasil Uji Ketepatan Model

- a) Koefisien Determinasi

Tabel 4.7

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.807 ^a	.651	.640	1.42868

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Data primer diolah, 2020.

Berdasarkan hasil regresi dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.640 menunjukkan bahwa 64% variabel independen dijelaskan oleh variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 36% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain.

b) Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 4.8

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	362.112	3	120.704	59.136	.000 ^b
	Residual	193.908	95	2.041		
	Total	556.020	98			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Data primer diolah, 2020.

Pada tabel Anova atau *F-test* didapatkan F_{hitung} 59.136 dengan nilai signifikansinya 0,000. Nilai ini dipergunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya yaitu 59.136 dengan signifikansinya 0,000. Dikarenakan nilai probabilitasnya <0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi mampu memprediksi variabel terikatnya. Artinya, **variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikatnya**. Hal tersebut mengindikasikan model pada studi ini layak untuk digunakan.

c) Uji Regresi Parsial (Uji t)

Tabel 4.9

Hasil Uji t

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	6.899	2.181		3.163	.002
1	X1	.059	.158	.026	.372	.710
	X2	.531	.168	.302	3.154	.002
	X3	.655	.112	.542	5.852	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah, 2020.

Uji t dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah secara langsung variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak.

- a. Variabel akuntabilitas menunjukkan hasil nilai koefisien parameter variabel sebesar 0.059 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.710, sehingga dengan tingkat signifikan diatas 0,05, maka H_1 ditolak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pemberdayaan masyarakat.
- b. Variabel transparansi menunjukkan nilai koefisien parameter variabel sebesar 0.531 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002, sehingga dengan tingkat signifikan dibawah 0,05, maka H_2 diterima. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pemberdayaan masyarakat.
- c. Variabel partisipasi masyarakat menunjukkan nilai koefisien parameter variabel sebesar 0.655 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, sehingga dengan tingkat signifikan dibawah 0,05, maka H_3 diterima. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pemberdayaan masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.
 Akuntabilitas adalah permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan kinerja pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini didapat hasil dimana akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rina Indrawati Syafi'I, dkk (2018) dikarenakan laporan pertanggung jawaban tidak secara langsung berdampak pada pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini akuntabilitas merupakan laporan pengelolaan dana desa sebagai sumber informasi untuk masyarakat mengetahui realisasi penggunaan anggaran dana desa . Dalam pelaksanaannya akuntabilitas dilakukan dengan pemasangan spanduk pengumuman yang berisikan laporan realisasi penggunaan dana desa di balai desa setempat sebagai upaya

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Fenomena yang terjadi di Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, memperlihatkan akuntabilitas yang baik akan tetapi masyarakat tidak merasakan dampak dari akuntabilitas tersebut, dimana masyarakat desa yang notabene sebagai petani mungkin kurang memahami mekanisme mengenai laporan realisasi penggunaan dana desa dan merasa tidak berkepentingan untuk mengetahui laporan realisasi pengelolaan dana desa tersebut karena masyarakat mempercayakan sepenuhnya pengelolaan dana desa kepada aparatur desa sebagai perwakilan dari mereka. Akuntabilitas hanya dirasakan bagi mereka yang mengelola dana desa, serta memiliki peran untuk mengalokasikan dana desa (budgeting) serta para pengambil keputusan terkait pengelolaan dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Yulia Kurniawati (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi dana kampung tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Pengaruh transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

Hasil analisa dan pengujian hipotesisnya tersebut, bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa mempengaruhi secara positif dan signifikan pada pemberdayaan masyarakat Di Desa Songan B. Transparansi adalah salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan teori keagenan tentang asimetri informasi, di mana masyarakat selaku prinsipal tidak mendapatkan informasi yang sama dengan pemerintah desa selaku agen, dengan adanya transparansi ini diharapkan masyarakat mendapatkan informasi secara actual dan lengkap, sehingga terindar dari adanya asimetri informasi antara kedua belah pihak. Dengan adanya keterbukaan informasi dan juga keterlibatan masyarakat desa dalam musyawarah desa, maka program pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Hasil uji dengan menggunakan regresi linier berganda sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan yang menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Nilai regresi menunjukkan nilai positif sebesar 0.531 dengan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan hubungan yang searah antara transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari I Made Yoga Darma Putra (2018) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh secara positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Partisipasi merupakan hal yang penting dilakukan untuk mencapai tujuan dari dana desa itu sendiri yaitu adalah mensejahterakan masyarakat dimana partisipasi masyarakat ini dilaksanakan untuk mengupayakan masyarakat agar lebih mandiri. Analisis ini dikuatkan dengan hasil uji hipotesis yang memberikan hasil nilai regresi positif sebesar 0.655 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, dari menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Anita Firdaus (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan hasil dan pembahasan di atas melalui pembuktian terhadap hipotesis, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa akuntabilitas tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan tingkat pemberdayaan masyarakat di Desa Songan B .
2. Transparansi pengelolaan dana desa mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jika semakin tinggi transparansi pengelolaan dana desa, maka pemberdayaan masyarakat semakin meningkat, sebaliknya jika transparansi pengelolaan dana desa semakin rendah maka pemberdayaan masyarakat akan semakin menurun.
3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jika semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, maka pemberdayaan masyarakat semakin meningkat, sebaliknya jika partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa semakin rendah maka pemberdayaan masyarakat akan semakin menurun.

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Saran untuk pemerintah Desa Songan B, diharapkan agar lebih mengoptimalkan tingkat partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pengelolaan dana desa mulai dari proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pada evaluasi hasil yang dicapai dan memberikan keterbukaan informasi mengenai akuntabilitas atau pertanggung jawaban setiap program yang telah dilaksanakan dan direalisasikan. Agar

masyarakat dapat memanfaatkan program yang telah dilaksanakan dan sumber daya alam yang sudah ada secara optimal sehingga masyarakat lebih mandiri sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di desa Songan B.

2. Bagi mahasiswa, hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan kajian pustaka untuk penelitian selanjutnya yang meneliti terkait penelitian tentang dana desa, yaitu dengan menambah variabel dan memperbesar sampel. Hal tersebut bertujuan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran lebih luas dan terkini mengenai pengelolaan keuangan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Amalia Sugista Rizky.2017. Pengaruh Transparansi Akantabilitas Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Lampung Selatan. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Ardiyanti, Rika. 2019. “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Skripsi Universitas Negeri Walisongo Semarang.
- Erni Tahir. (2018) Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus pada desa Jaya Makmur, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi).
- Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, dan Herman Lubis. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir). Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol.14 No.3. Universitas Sriwijaya: Palembang.
- Firdaus, Anita. (2020).Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Suci. 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo.
- <https://republika.co.id/berita/pwd7sc370/tahun-depan-dana-desa-fokus-kembangkan-potensi-ekonomi-desa>.
- Ismail, Widagdo, Widodo. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume XIX No. 2, Agustus 2016 ISSN 1979-6471.
- Kurniawati, Yuli. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung Dan Kelembagaan Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nurfitriani, Alfi, *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, Garut, 2019*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Putra, I Made Yoga Darma dan Ni Ketut Rasmini. 2019. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa". *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 28, No.1.
- Sugista, Rizky Amalia, *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan, 2017*.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sumaryadi, Nyoman I. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.
- Suyana, Utama, M. (2016). *Aplikasi Analisis Kuantitatif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Denpasar: CV Sastra Utama.
- Syafi'i, Rina Indrawati, Dkk., *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)*, Malang, 2018.
- Tahrir, Eni, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Kendari, 2018*.
- Tumbel, Satria Mentari. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal PSP Pascasarjana UNSRAT 2017*.

Ultafiah, Weny, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Palembang, 2017.

Umaira, Siti, Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Aceh, 2019.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara

Utami, Ratih Ranika Putri, Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Sidoharjo, 2020.

Utami, Kurnia dan Efrizal Syofyan, 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. Jurnal WRA, Vol.1, No.1